

ROLE RECONSTRUCTION AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE SHARING OF THE SHARE BACK IN A LIMITED VALUE COMPANY

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the roles and responsibilities of directors in the current share repurchase of limited liability companies; the validity of the share buyback without the approval of the GMS is the responsibility of the board of directors; and reconstructing the roles and responsibilities of the directors in the share repurchase of a fair value-based limited company.

This type of research used in this dissertation is to use the method of doctrinal law research. The research approach in this study uses a sociolegal research approach, that is, an alternative approach that tests doctrinal studies of law. This research was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The results of this study are: (1) The owner of the authority to repurchase shares is actually at the RUPS (Article 38), because the true share repurchase can only be done on the basis of a RUPS decision. If the authority (default) is at the GMS, according to the author, it is excessive provisions that bear responsibility to the directors, even though it is empirically the directors who carry out the GMS decisions. With its power the board of directors can make the decision to make transactions for their own interests or those of other parties, not for the company. For this reason, Bapepam requires the approval of the majority of independent shareholders. If the transaction is carried out without meeting these requirements, then the actions of the directors and commissioners are considered to be acts outside their authority (*ultra vires*). Thus, the actions of directors and commissioners are contrary to the Company Law Article 85 number (1) and Article 98; (2) Buy back of company shares by directors is an action that is an obligation given by the law that must be fulfilled by him. Therefore the act of repurchasing shares by the directors does not cause abuse by the company's organs. In this case, in terms of the principles and hierarchy of legislation, the validity of the share repurchases carried out without going through the GMS is invalid; and (3) The main reconstruction is a form of legal protection that can be obtained fairly by the parties. So this is where researchers emphasize the existence of the grounds that are used as a reason for the reconstruction of the roles and responsibilities of directors in the repurchase of shares in a fair value-based limited company, namely by carrying out reconstruction of Article 37 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies .

Keywords: Reconstruction, Roles and Responsibilities, Directors, Shares Buy Back, Limited Liability Company, Fair Value

REKONSTRUKSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas; keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi; serta merekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal (*sociolegal research*), yaitu, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pemilik kewenangan untuk melakukan pembelian kembali saham sejatinya ada pada RUPS (Pasal 38), karena sejatinya pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan atas dasar putusan RUPS. Kalau kewenangan (asali) tersebut ada pada RUPS, menurut penulis adalah berlebihan ketentuan yang memikulkan tanggung jawab kepada direksi, sekalipun secara empiris direksilah yang menjalankan keputusan RUPS. Dengan kekuasaannya direksi dapat mengambil keputusan bertransaksi demi kepentingannya atau kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Untuk itu Bapepam mengharuskan persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan di luar kewenangannya (*ultra vires*). Dengan demikian, tindakan direksi dan komisaris bertentangan dengan UUPT Pasal 85 angka (1) dan Pasal 98; (2) Pembelian kembali saham perseroan oleh direksi adalah tindakan yang merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang yang harus dipenuhi olehnya. Oleh karenanya tindakan pembelian kembali saham oleh direksi tidak menyebabkan terjadinya penyalahgunaan oleh organ perseroan. Dalam hal ini bila ditinjau dari asas-asas dan hierarki perundang-undangan maka keabsahan pembelian kembali saham yang dilakukan tanpa melalui RUPS adalah tidak sah; serta (3) Rekonstruksi utamanya sebagai wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh secara adil bagi para pihak. Sehingga disinilah peneliti mempertegas adanya dasar-dasar yang dijadikan alasan terjadinya rekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan, yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Peran dan Tanggung Jawab, Direksi, Pembelian Kembali Saham, Perseroan Terbatas, Nilai Keadilan